



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

EVALUASI PENGELOLAAN DANA KIP KULIAH: PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DI PENDIDIKAN ISLAM

Purnomo Mulyosaputro

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: 233625207.purnomo@uinbanten.ac.id

ABSTRAK

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Upaya pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi menjadi fokus utama dalam pengelolaan dana KIP Kuliah. Kerjasama antara perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan juga diidentifikasi sebagai kunci keberhasilan program. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini meliputi perbedaan sistem informasi dan keterbatasan sumber daya manusia, yang memerlukan upaya harmonisasi dan peningkatan kapasitas. Dengan data yang akurat dan sistem pengawasan yang efektif, diharapkan KIP Kuliah dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen, penelitian ini dilaksanakan secara objektif dan professional judgement penulis dengan menggunakan data penggunaan KIP-K tahun anggaran 2023. Sampel penelitian dilakukan terhadap 20 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang diambil secara acak (random). Penelitian mengungkap Ketersediaan Anggaran, jumlah Penerima KIP Kuliah, alokasikan kuota khusus untuk mahasiswa yang berasal dari daerah 3T, hasil penelitian pada 5 (lima) unit eselon satu Kemenag, manfaat Dana KIP-K, Dampak KIP Kuliah terhadap peningkatan prestasi penerima bantuan, permasalahan pada pelaksanaan program KIP-K, keberhasilan dari program KIP-K, penelitian kenaikan IPK penerima dan survei Kepuasan Program.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

Kata kunci: Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Inspektorat Jenderal, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, survey kepuasan program

ABSTRACT

The Indonesia Smart Lecture Card Program (KIP-K) aims to increase access and equitable distribution of higher education opportunities for the Indonesian people, especially for those from underprivileged families. Efforts to prevent corruption and increase accountability and transparency are the main focus in the management of KIP Lecture funds. Cooperation between universities, the Ministry of Education, and the Ministry of Finance was also identified as the key to the success of the program. The challenges faced in the implementation of this program include differences in information systems and limited human resources, which require efforts to harmonize and increase capacity. With accurate data and an effective supervision system, it is hoped that KIP Lecture can contribute to improving the quality of education in Indonesia. The research was carried out using field observation methods, interviews, and document analysis, this research was carried out objectively and professionally judgement the author using data on the use of KIP-K for the 2023 fiscal year. The research sample was conducted on 20 State Religious Universities (PTKN) which were taken randomly. The research revealed the availability of the budget, the number of KIP Lecture Recipients, the allocation of special quotas for students from the 3T area, the results of research on 5 (five) units of the first echelon of the Ministry of Religion, the benefits of the KIP-K Fund, the impact of KIP Lecture on the improvement of the achievement of aid recipients, problems in the implementation of the KIP-K program, the success of the KIP-K program, research on the increase in GPA recipients and Program Satisfaction surveys.

Keywords: Smart Indonesia Card (KIP) College, Inspectorate General, State Religious Universities, program satisfaction survey



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, pendidikan tinggi tidak hanya sebagai wahana penciptaan sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga sebagai pemberi inovasi dan kemajuan sosial-ekonomi. Melalui pendidikan tinggi negara dapat mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing pada tingkat nasional dan internasional, selain itu pendidikan tinggi dapat memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan (Jupon et al., 2020; Wicaksono & Aliem, 2021). Namun, di tengah upaya pemerintah untuk mewujudkan akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif, masih terdapat tantangan dalam hal kesenjangan ekonomi dan geografis hal ini merupakan hambatan yang signifikan.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.¹ Program ini diluncurkan agar mahasiswa dari golongan keluarga prasejahtera dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus terkendala dengan biaya, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka putus kuliah dan meningkatkan kompetensi generasi penerus bangsa. Selain itu KIP Kuliah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pemerataan pendidikan dan keadilan sosial.

Namun demikian, dalam program KIP-K masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan, yang harus terus menerus dilakukan pengawasan dan diperbaiki. Beberapa masalah banyak dijumpai dalam menjalankan program KIP-K. Diantaranya adalah kasus penyalahgunaan serta pemalsuan data, kurangnya sosialisasi terhadap cara penyaluran dana digunakan untuk program KIP-K tersebut.² Di sinilah peran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama menjadi sangat krusial. Sebagai lembaga pengawas intern, Itjen mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses penyaluran dana KIP Kuliah berlangsung dengan transparan, akuntabel,

¹ Rahmi Zainal et al., "Manajemen Pengelolaan Keuangan Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Pada Perguruan Tinggi Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Persada Bunda (STIE-STISIP-STBA-STIH)," n.d., <https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/JIPM>.

² Inna Kuswandari, Abulloh Jaelani, and Nenek Estuningsih, "Sinergi Kartu Indonesia Pintar Dan Bidikmisi Sebagai Motivasi Studi Lanjut Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas," *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)* 7, no. 2 (July 6, 2022): 934–41, <https://doi.org/10.21067/jpm.v7i2.6833>.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan melakukan pengawasan, audit, dan pembinaan secara berkala, Itjen berperan dalam mencegah praktik-praktik korupsi serta menjaga integritas program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Peran Itjen dalam mengawal program KIP Kuliah merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk menjaga "harta karun" pendidikan ini demi masa depan bangsa yang lebih cerah.

Definisi Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan melalui memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (1998:58). Selanjutnya Terry (1991:137), juga menyampaikan bahwa pengawasan merupakan usaha pengendalian birokrasi ataupun organisasi yang harus dilakukan dengan baik, karena apabila tidak dilakukan, secara cepat atau lambat dapat membawa akibat kehancuran suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri. Pengawasan dalam lingkup pendidikan, khususnya program KIP Kuliah, dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini melibatkan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap seluruh aspek program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk menjaga terlaksananya program dengan baik dan akuntabel, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memastikan bahwa manfaat KIP Kuliah dapat dirasakan oleh mahasiswa yang berhak.

Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan menurut sifat atau waktu menurut Handyaningrat (1986:145-146) dapat dibedakan menjadi:

- a. Pengawasan preventif: Dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Contoh: melakukan verifikasi data calon penerima



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

KIP Kuliah sebelum penyaluran dana, penyusunan standar operasional prosedur (SOP).

- b. Pengawasan represif: Dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dan mencegah terulangnya di masa mendatang dan pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai rencana. Contoh: melakukan audit terhadap penggunaan dana KIP Kuliah yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dalam lingkup pengawasan terhadap program KIP Kuliah, Inspektorat Jenderal memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan secara komprehensif, baik pengawasan preventif maupun pengawasan represif.

Prinsip-Prinsip Pengawasan yang Baik

Menurut Sukarna (2011:112) Dimana telah mengutip pendapat Koontz dan Cyril O'Donnel menjelaskan prinsip-prinsip pengawasan yang baik diantaranya:

- a. Prinsip Tercapainya Tujuan (*Principle of assurance of objective*).
Pengawasan hendaknya diarahkan kepada ketercapaian tujuan, dengan melakukan perbaikan (koreksi) agar menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi dari perencanaan yang telah dibuat.
- b. Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*).
Pengawasan akan bernilai efisien apabila dapat menghindari penyimpangan dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diperlukan.
- c. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responsibility*).
Pengawasan yang baik bergantung pada komitmen manajer dalam menjalankan rencana.
- d. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*).
Pengawasan harus berorientasi pada pencegahan deviasi perencanaan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
- e. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*).
Kualitas manajer yang tinggi merupakan kunci keberhasilan dalam menerapkan sistem kontrol yang efektif. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa faktor manusia, yang rentan terhadap kesalahan, perlu diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang memadai.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

- f. Prinsip Refleksi pada Perencanaan (*Principle of reflection of plan*).
Pengawasan harus dirancang secara cermat untuk merefleksikan detail-detail spesifik dari setiap tahap perencanaan.
- g. Prinsip Standar (*Principle of standar*).
Standar yang ditetapkan harus dapat mengukur tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses yang dilalui dalam mencapai hasil tersebut
- h. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*).
Pengawasan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi, sehingga pelaksanaan rencana dapat tetap berada pada jalur yang benar.

Dalam pengawasan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip tercapainya tujuan diterapkan dengan memastikan bahwa mahasiswa penerima benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu dan memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Prinsip efisiensi pengawasan juga berperan penting agar anggaran yang dialokasikan tidak disalahgunakan dan sepenuhnya digunakan untuk mendukung pendidikan mahasiswa penerima. Selain itu, tanggung jawab pengawasan melibatkan komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam memastikan proses seleksi, pencairan dana, serta pelaporan berjalan transparan dan akuntabel.

Pengawasan pada KIP Kuliah juga harus bersifat preventif untuk menghindari potensi penyimpangan, seperti ketidaktepatan data penerima atau penyaluran dana yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan melakukan audit serta monitoring secara berkala. Dengan fleksibilitas pengawasan, kebijakan dapat terus disesuaikan mengikuti dinamika pendidikan tinggi, regulasi terbaru, serta kebutuhan mahasiswa. Melalui penerapan prinsip-prinsip pengawasan yang baik, Inspektorat Jenderal berperan dalam menjaga integritas dan efektivitas program KIP Kuliah agar benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa yang membutuhkan.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

Sejarah dan Perkembangan Program KIP Kuliah

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pertama kali diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Program ini merupakan program inisiatif dari Presiden pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah menyadari akan perlunya upaya yang konkret untuk dapat mengatasi kesenjangan akses pendidikan antara masyarakat mampu dan yang tidak mampu. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata di Indonesia.³

Pada tahun 2007 program ini diperkenalkan dan sampai saat ini terus mengalami pengembangan dan perluasan cakupan. Program KIP dibagi kedalam beberapa jenis, diantaranya berdasarkan jenjang pendidikannya, yaitu KIP Sekolah (saat ini berkembang menjadi PIP atau dikenal dengan Program Indonesia Pintar) dan KIP Kuliah. Perbedaan keduanya hanya terletak pada target sasaran penerimanya saja, pada KIP sekolah sasaran target diberikan kepada peserta didik yang ingin bersekolah di jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, sedangkan sasaran target penerima KIP Kuliah adalah para calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bentuk pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi program unggulan Presiden RI ketujuh Joko Widodo. Kartu ini diresmikan peluncurannya berbarengan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera pada 3 November 2014.⁴ Kartu Indonesia Pintar diperuntukkan bagi anak peserta didik pada usia 6-21 tahun, dengan harapan dapat memberikan manfaat pada dunia pendidikan secara optimal. Pada awal

³ Siti Zakiyah, "Apa Itu KIP Kuliah Merdeka?," *Telkom University*, 2024, [https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-kip-kuliah-merdeka/#:~:text=Program Kartu Indonesia Pintar \(KIP, keluarga kurang mampu di Indonesia.](https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-kip-kuliah-merdeka/#:~:text=Program%20Kartu%20Indonesia%20Pintar%28KIP%2Ckeluarga%20kurang%20mampu%20di%20Indonesia.)

⁴ Andylala Waluyo, "Presiden Jokowi Luncurkan 3 Kartu Untuk Rakyat Miskin Indonesia," *Voaindonesia.Com*, 2014, <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-luncurkan-3-kartu-untuk-rakyat-miskin/2505763.html>.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

kebijakan ini partai oposisi (Partai Gerindra) menganggap ini merupakan program untuk meredam sementara masalah kenaikan harga BBM.⁵ Presiden Joko Widodo dikritik karena meluncurkan program yang tidak mempunyai landasan hukum dan telah melanggar tertib anggaran.⁶ Terhadap pernyataan tersebut telah dibantah oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan alasan bahwa program tersebut sebenarnya program kelanjutan dari program yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.⁷ Lebih lanjut mengenai Sejarah KIP Kuliah ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi (Kemendikristek), Togar Mangihut Simatupang, menutarakan sejarah KIP kuliah sudah dimulai sejak tahun 2010 dengan nama Bidikmisi dan pada tahun 2020 program tersebut berubah nama menjadi KIP Kuliah.

Program KIP Kuliah merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Program ini mengalami beberapa tahap perkembangan, dimulai dari program Bidikmisi hingga kemudian bertransformasi menjadi KIP Kuliah. Tujuan utama dari transformasi ini antara lain untuk menyederhanakan proses pendaftaran dan penyaluran bantuan, serta memperluas cakupan penerima manfaat.⁸

Tujuan dan Sasaran Program KIP Kuliah

Dalam petunjuk teknis (Juknis) program kartu indonesia pintar kuliah Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Islam tahun anggaran 2023 Program KIP Kuliah bertujuan untuk untuk meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sasaran spesifik dari program ini antara lain: meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi,

⁵ Dani Prabowo, "Politisi Gerindra: 'Kartu Sakti' Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM," *18 November*, 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/09221121/Politisi.Gerindra.Kartu.Sakti.Jokowi.Hanya.Redam.Sementara.Dampak.Kenaikan.Harga.BBM>.

⁶ "Distribusi 14 Juta Keping KIP Ditargetkan Tuntas Mei 2016 _ Republika Online," n.d.

⁷ "Anggaran Kartu Sakti Jokowi Sudah Ada Di APBN 2014 _ Politik...," n.d.

⁸ Ajib Rakhmanto, "Pengertian Istilah Dan Sejarah Audit" 3 (2001): 1-45.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280
Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk menyelesaikan studinya, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bersaing dengan dunia global.

Mekanisme Pengawasan yang Dilakukan Itjen

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menggunakan berbagai metode pengawasan untuk memastikan pelaksanaan Program KIP Kuliah berjalan dengan baik. Terdapat beberapa metode yang pada umumnya digunakan antara lain:

- a. **Audit keuangan:** Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana KIP Kuliah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- b. **Audit kinerja:** Mengevaluasi kinerja perguruan tinggi dalam mengelola program KIP Kuliah.
- c. **Peninjauan lapangan:** Melakukan kunjungan langsung ke perguruan tinggi untuk melakukan verifikasi data dan wawancara dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah.
- d. **Analisis data:** Menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi potensi masalah dan tren yang muncul.

Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam Mengawal Penyaluran Dana KIP Kuliah

Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan penyaluran dana bantuan KIP Kuliah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Beberapa peran Itjen meliputi:

a. Perencanaan dan Pengawasan:

Peran Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam perencanaan penyaluran KIP Kuliah sangatlah strategis. Sejak tahap awal, Itjen berperan aktif dalam menganalisis potensi risiko yang dapat menghambat penyaluran dana atau menyebabkan terjadinya penyimpangan. Dengan melakukan analisis mendalam, Itjen dapat mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap penyalahgunaan dana atau



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

ketidaktepatan sasaran. Selain itu, Itjen juga mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang terkait dengan KIP Kuliah untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan program.

Pengembangan sistem pengawasan yang efektif menjadi fokus utama Itjen dalam tahap perencanaan. Sistem ini dirancang untuk memantau seluruh proses penyaluran dana, mulai dari verifikasi data penerima hingga pencairan dana. Itjen juga berperan aktif dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan detail untuk setiap tahapan, sehingga semua pihak yang terlibat memiliki pedoman yang sama. Dengan adanya SOP yang komprehensif, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Tujuan utama dari peran Itjen dalam perencanaan penyaluran KIP Kuliah adalah untuk:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan: Dengan melakukan analisis risiko dan evaluasi kebijakan, Itjen dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan pencegahan sejak dini.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Sistem pengawasan yang dirancang oleh Itjen akan memastikan bahwa seluruh proses penyaluran dana dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menjamin penyaluran dana tepat sasaran: Dengan melakukan verifikasi data dan evaluasi berkelanjutan, Itjen membantu memastikan bahwa dana KIP Kuliah hanya diterima oleh mahasiswa yang benar-benar berhak.
4. Melakukan Evaluasi Berkala: Itjen melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem pengawasan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi potensi risiko dan kelemahan yang perlu diperbaiki.
5. Pencegahan dan Deteksi Fraud, dengan Langkah-langkah:
 - a) Analisis Risiko: Itjen melakukan analisis risiko secara mendalam untuk mengidentifikasi potensi terjadinya fraud atau penyimpangan dalam penyaluran dana KIP Kuliah;
 - b) Menerapkan Mekanisme Pengendalian Intern: Itjen menerapkan mekanisme pengendalian intern yang kuat untuk mencegah terjadinya fraud, seperti pemisahan tugas, otorisasi ganda, dan rekonsiliasi data;



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

- c) Melakukan Investigasi: Apabila ditemukan indikasi terjadinya fraud, Itjen akan melakukan investigasi secara menyeluruh dan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Koordinasi dengan berbagai stakeholder

Koordinasi dengan berbagai stakeholder merupakan aspek penting lainnya dalam peran Itjen. Itjen berkoordinasi dengan perguruan tinggi, kementerian/lembaga terkait, dan pihak-pihak lainnya untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan program KIP Kuliah. Kerjasama dengan Instansi Lain: Itjen menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga audit lainnya, untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai lembaga pengawas internal pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan pelaksanaan program KIP Kuliah berjalan sesuai dengan aturan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, Itjen perlu berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait. Koordinasi dengan perguruan tinggi sebagai pelaksana langsung program sangat penting untuk memperoleh data yang akurat dan up-to-date mengenai pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai regulator dan pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program dengan peraturan yang berlaku. Kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Keuangan juga penting untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Melalui koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, Itjen dapat melakukan pengawasan yang komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program KIP Kuliah.

Dalam hal, auditor berdasarkan pertimbangan profesional menganggap bahwa tingkat risiko penugasan audit menjadi sangat tinggi dan berdampak pada pencapaian tujuan audit seperti dilakukannya penanganan kasus pidana korupsi oleh



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

aparat penegak hukum atas pengadaan barang/jasa tersebut, maka auditor harus melaporkan kondisi tersebut kepada penanggung jawab audit.⁹

c. Pencegahan korupsi

Upaya pencegahan korupsi juga menjadi perhatian utama Itjen. Dengan mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap korupsi, Itjen dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk memperkuat sistem pengendalian internal.

d. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi:

- 1) Audit Reguler: Itjen melaksanakan audit reguler terhadap pengelolaan dana KIP Kuliah di seluruh satuan kerja Kementerian Agama, baik di pusat maupun di daerah;
- 2) Laporan Audit: Itjen menyusun laporan audit yang komprehensif dan objektif, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen;
- 3) Publikasi Hasil Audit: Hasil audit Itjen publikasikan secara terbuka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KIP Kuliah.
- 4) Kontribusi untuk Kualitas Pendidikan: Dengan menjalankan peran-peran tersebut, Itjen Kementerian Agama berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui pengawasan yang efektif, Itjen memastikan bahwa dana KIP Kuliah disalurkan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keberhasilan studi para mahasiswa yang kurang mampu.

Peran Itjen dalam mengawal penyaluran dana KIP Kuliah sangat penting, antara lain:

- a. Menjamin Keadilan: Dengan memastikan dana disalurkan kepada mahasiswa yang benar-benar berhak, Itjen berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial.
- b. Meningkatkan Efektivitas Program: Melalui pengawasan yang ketat, Itjen membantu memastikan bahwa program KIP Kuliah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁹ Purnomo Mulyosaputro, *Langkah-Langkah Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi/Konsultansi)*, ed. Zulfa, Farha Pustaka, Pertama, vol. 1 (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021).



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

- c. Mencegah Korupsi: Dengan melakukan deteksi dini dan penindakan terhadap tindakan korupsi, Itjen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas pengawasan pada penyaluran Bantuan KIP Kuliah:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):
Kompetensi pegawai, integritas dan independent auditor merupakan faktor dalam kualitas SDM. Itjen harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang keuangan, audit, dan peraturan perundang-undangan terkait KIP Kuliah. Selain itu faktor Integritas yang tinggi juga sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan. Pegawai Itjen harus bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Prosedur dan Cakupan Pengawasan
Kelengkapan Prosedur pengawasan harus lengkap dan mencakup seluruh aspek pengelolaan dana KIP Kuliah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Frekuensi pengawasan harus disesuaikan dengan tingkat risiko dan kompleksitas program. Prosedur pengawasan yang komprehensif merupakan kunci keberhasilan dalam memastikan pengelolaan dana KIP Kuliah berjalan sesuai dengan aturan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Prosedur ini harus dirancang secara rinci dan mencakup seluruh tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan adanya prosedur pengawasan yang lengkap dan efektif, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana KIP Kuliah, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan mahasiswa yang membutuhkan.
- c. Ketersediaan Data dan Informasi:
Data dan informasi yang digunakan dalam pengawasan harus akurat, relevan, dan terkini. Auditor harus memiliki akses yang mudah terhadap sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data KIP Kuliah. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan lengkap merupakan pilar penting dalam pengawasan efektivitas program KIP Kuliah. Data-data mengenai mahasiswa penerima, seperti identitas, latar belakang sosial ekonomi, prestasi akademik, dan progres studi, menjadi kunci



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran. Selain itu, data terkait penggunaan dana, termasuk jenis pengeluaran, jumlah dana yang digunakan, dan bukti-bukti pendukung, sangat krusial untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Data prestasi akademik mahasiswa penerima KIP Kuliah juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mendukung pengelolaan data yang efisien, diperlukan sistem informasi terintegrasi yang mampu mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data dari berbagai sumber. Sistem ini akan mempermudah proses pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan hasil pengawasan.

Meskipun penting, ketersediaan data seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah kualitas data yang tidak merata. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seringkali memiliki format yang berbeda dan tingkat akurasi yang beragam. Selain itu, keterlambatan dalam pelaporan data juga dapat menghambat proses pengawasan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya. Pertama, perlu adanya standarisasi format data yang seragam untuk memudahkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengelola KIP Kuliah di perguruan tinggi mengenai pentingnya menjaga kualitas data dan cara pelaporan yang benar. Ketiga, perlu terus dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data KIP Kuliah.

Dengan memastikan ketersediaan data yang akurat, relevan, dan terkini, proses pengawasan terhadap program KIP Kuliah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini akan berkontribusi pada keberhasilan program KIP Kuliah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu.

Ketersediaan data yang berkualitas adalah fondasi kuat dalam pengawasan KIP Kuliah. Dengan data yang lengkap dan akurat, kita dapat memastikan dana digunakan secara tepat, mengukur keberhasilan program, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.

d. Kerjasama dengan Pihak Terkait:

Kerjasama yang erat antara perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

kementerian/lembaga terkait lainnya merupakan kunci keberhasilan dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas program KIP Kuliah. Perguruan tinggi sebagai pelaksana langsung program memiliki akses langsung terhadap data mahasiswa penerima dan informasi terkait penggunaan dana. Kemendikbudristek berperan sebagai regulator yang menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur pengawasan. Sementara itu, Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk dana KIP Kuliah. Keterkaitan antara ketiga pihak ini menciptakan sinergi yang kuat dalam pengawasan. Dengan adanya kerjasama ini, data dapat divalidasi secara bersama, potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini, dan kebijakan pengawasan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Namun, kerjasama ini juga menghadapi tantangan seperti perbedaan sistem informasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan koordinasi yang belum optimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya harmonisasi sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan mekanisme koordinasi yang lebih baik. Dengan demikian, kerjasama yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pengawasan, memastikan penyaluran dana tepat sasaran, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah. Kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi penerima bantuan sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

e. **Teknologi Informasi:**

Teknologi informasi berperan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan KIP Kuliah. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data mahasiswa penerima bantuan secara efisien dan akurat. Dengan sistem ini, data-data seperti identitas mahasiswa, prestasi akademik, dan penggunaan dana dapat diakses dan dianalisis secara real-time. Selain itu, sistem informasi juga dapat digunakan untuk melakukan verifikasi data secara otomatis, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan. Analisis data yang mendalam menggunakan sistem informasi memungkinkan identifikasi pola dan tren yang berguna dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dengan menganalisis data prestasi akademik mahasiswa penerima KIP Kuliah, dapat diketahui program studi mana yang paling banyak diminati oleh penerima bantuan, serta sejauh mana bantuan tersebut



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280
Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

berdampak pada peningkatan prestasi akademik. Informasi ini sangat berharga bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih relevan dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen, penelitian ini dilaksanakan secara objektif dan *professional judgement* penulis. Penelitian dilakukan pada tahun 2024 dengan menggunakan data tahun anggaran 2023.

Sampel penelitian dilakukan terhadap 20 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang diambil secara acak (random), berikut PTKN yang dijadikan sampling:

No	PTKN	Provinsi
1	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Jawa Timur
2	UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto	Jawa Tengah
3	UIN Mataram	Nusa Tenggara Barat
4	UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Sumatera Barat
5	UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan	Jawa Tengah
6	UIN KH Achmad Siddiq Jember	Jawa Timur
7	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Bengkulu
8	UIN Raden Mas Said Surakarta	Jawa Tengah
9	STABN Sriwijaya Tangerang	Banten
10	IAKN Manado	Sulawesi Utara
11	IAKN Kupang	Nusa Tenggara Timur
12	IAIN Ternate	Maluku Utara
13	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik	Bangka Belitung
14	IAIN Sorong	Papua Barat



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280
Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

15	IAIN Palopo	Sulawesi Selatan
16	IAIN Madura	Jawa Timur
17	IAIN Langsa	Aceh
18	IAIN Kudus	Jawa Tengah
19	IAIN Fattahul Muluk Jayapura	Papua
20	IAHN Tampung Penyang Palangka Raya	Kalimantan Tengah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian atas penyelenggaraan program KIP-K Kementerian Agama TA. 2023 terhadap 20 PTKN, sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Anggaran dan Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K):
Jumlah anggaran KIP-K Tahun 2023, pada 20 PTKN sampel anggaran KIP Kuliah yang tersedia sebesar Rp215.768.381.000,00 dengan jumlah mahasiswa penerima sebanyak 32.692 mahasiswa.
- b. Rincian alokasi anggaran KIP-K Tahun 2023, untuk PTKN sampel:

Anggaran	2023 Baru	On Going 2022	On Going 2021	On Going 2020	Bidikmisi 2019
Jumlah	47.154.581.000	48.965.400.000	48.357.600.000	53.314.800.000	16.127.400.000

Bila melihat rincian alokasi anggaran maka dapat dikatakan anggaran KIP-K cenderung tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sementara jumlah mahasiswa pendaftar meningkat setiap tahunnya.

- c. Rasio Penerima KIP-K Dengan Jumlah Mahasiswa Kategori Miskin tahun 2022/2023



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

Uraian	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Penerima KIP-K	Persentase penerima KIP Kuliah/jumlah mahasiswa	Penerima KIP-K dari 3T
Jumlah	245.801	32.011	33,80	2.480

- d. Berdasarkan tipologi PTKN, pembagian anggaran masih belum merata. Rasio Penerima KIP-K Dengan Jumlah Mahasiswa Kategori Miskin tahun akademik 2022/2023 hampir seluruh PTKN sampel tidak mengalokasikan kuota khusus untuk mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), namun dari data sampel mahasiswa penerima sebanyak 2.480 mahasiswa, atau sekitar 7,56% merupakan mahasiswa 3T.
- e. Hasil penelitian pada 5 (lima) unit eselon satu Kemenag yang membawahi pendidikan tinggi (Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Buddha dan Ditjen Bias Hindu), baru 8% mahasiswa kategori miskin yang menerima KIP-K. Bahkan kuota KIP-K pada Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) baru mewadahi 3,92% atau sebanyak 49.002 mahasiswa.
- f. Penggunaan Dana KIP-K:
 Dari 6.841 responden mahasiswa penerima KIP-K, *living cost* digunakan untuk membayar biaya kosan/kontrakan, kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan membeli buku dan fotocopy, kebutuhan membeli Laptop, kebutuhan membeli HP/gadget;
- g. Dampak KIP Kuliah terhadap peningkatan prestasi penerima bantuan:
 Pemberian KIP-K memberikan dampak yang signifikan bagi penerima bantuan, sebanyak 3.812 mahasiswa mengalami peningkatan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) belajar atau sebesar 55,7% dari 6.841 responden dengan rerata IPK 3,68 artinya mahasiswa penerima bantuan merupakan mahasiswa pilihan yang berprestasi dalam akademik;
- h. Beberapa permasalahan pada pelaksanaan program KIP-K, diantaranya:
 1) Seleksi calon penerima bantuan KIP-K belum terstandarisasi dengan mekanisme yang jelas. Dari 20 PTKN sampel evaluasi, 40,1% mahasiswa calon penerima tidak mendapatkan visitasi dari Perguruan Tinggi



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

Penyelenggara (PTP). Verifikator melihat keadaan ekonomi calon penerima bantuan melalui foto saja. Pelaksanaan seleksi tidak dilakukan secara terpusat dan melalui satu portal seperti pada perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek. Seleksi bahkan dilakukan setelah ditetapkannya mahasiswa baru. Sehingga penerima KIP-K harus membayar terlebih dahulu biaya UKT yang tentunya memberatkan.

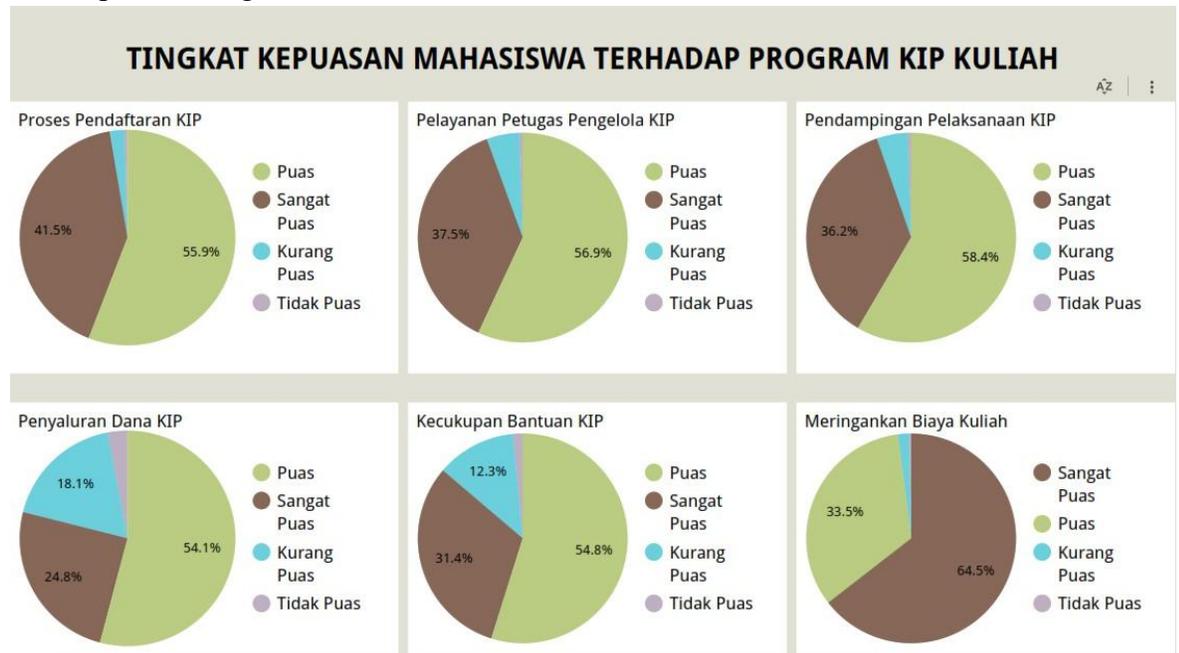
- 2) Hasil survei kepada 6.832 mahasiswa didapatkan 53,9% menyatakan bahwa pencairan sering mengalami keterlambatan, sehingga mahasiswa penerima KIP-K harus membayar dana talangan terlebih dahulu. Terlambatnya pencairan terjadi karena lamanya penetapan mahasiswa pengganti oleh pengelola. Penetapan penerima pengganti hanya melihat pada hasil seleksi awal dan sebagian dengan penunjukan langsung yang bahkan bukan merupakan angkatannya. Padahal penentuan penerima KIP-K pengganti seharusnya melalui proses seleksi dan verifikasi ulang.
- 3) Lulusan penerima Bidikmisi tahun 2018 belum seluruhnya menyelesaikan studi, 32,41% dari 1.654 mahasiswa sudah melewati batas 4 tahun pemberian bantuan. *Tracer study system* untuk melihat kualitas lulusan belum optimal dikembangkan oleh PTP. Sehingga tujuan program bantuan untuk memutus rantai kemiskinan belum dapat terjawab.
- 4) Tidak tersedianya anggaran untuk visitasi/cek fisik sehingga semua mahasiswa calon penerima KIP-K tidak dilakukan cek fisik, hal ini berpengaruh pada ketepatan sasaran calon penerima KIP Kuliah.
- 5) Tidak tersedianya anggaran pembinaan untuk penerima KIP Kuliah. Pembinaan formal dilaksanakan dengan mengikutkan pada acara kampus dan non formal dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan dan bimbingan lewat dosen. Penentuan alokasi kuota KIP Kuliah untuk mahasiswa afirmasi/mahasiswa yang berasal dari 3T belum diatur dalam pedoman/juknis.
- 6) Jumlah mahasiswa miskin yang belum menerima KIP Kuliah cukup signifikan.
- 7) Belum seluruh PTP menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Program KIP Kuliah.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280
Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

- i. Terdapat beberapa keberhasilan dari program KIP-K, yaitu:
 - 1) KIP-K secara nyata telah membantu 195.522 mahasiswa miskin.
 - 2) Hasil survei kepuasan terhadap 6.840 responden penerima bantuan menunjukkan hasil positif.
 - 3) Hasil penelitian terhadap sampel 6.832 mahasiswa, didapat rerata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa penerima KIP-Kuliah adalah 3,74 (sangat baik).
 - 4) Motivasi belajar penerima KIP-K pun ikut meningkat, 55,7% penerima mengalami kenaikan IP dibandingkan IP semester sebelumnya.
- j. Survei Kepuasan Program KIP-K



Tantangan dalam Pengawasan KIP Kuliah

Pelaksanaan pengawasan terhadap program KIP Kuliah dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks.

- a. program KIP Kuliah memiliki cakupan yang sangat luas, melibatkan banyak perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan menyentuh berbagai aspek mulai dari



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

seleksi penerima hingga pemanfaatan dana. Kompleksitas ini menuntut sistem pengawasan yang handal dan melibatkan berbagai pihak.

- b. Adanya tenggat waktu dalam pelaporan dan pertanggungjawaban membuat pengawas bekerja di bawah tekanan waktu yang cukup ketat. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan pengawasan yang mendalam dan menyeluruh.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan. Jumlah pengawas yang terbatas dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi penerima dan mahasiswa penerima KIP Kuliah membuat pengawasan menjadi kurang efektif.
- d. Keterbatasan anggaran juga menghambat penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih untuk mendukung proses pengawasan.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengawasan KIP Kuliah memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas program. Pertama, ketidakakuratan data dapat menyebabkan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga merugikan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Kedua, keterlambatan dalam identifikasi penyimpangan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar bagi negara. Ketiga, kualitas pengawasan yang kurang optimal dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap program KIP Kuliah. Hal ini dapat berdampak pada citra pemerintah dan mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program serupa di masa depan. Keempat, kurangnya efektivitas pengawasan dapat menghambat pencapaian tujuan utama program KIP Kuliah, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan dalam pengawasan KIP Kuliah dapat menghambat keberhasilan program dan berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Upaya Peningkatan Efektivitas Pengawasan

Untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan KIP Kuliah dan meningkatkan efektivitasnya, diperlukan beberapa upaya strategis. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Pengawas perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, baik dalam bidang keuangan, audit,



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

maupun teknologi informasi. Pelatihan secara berkala dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pengawas dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan, melakukan analisis data, dan menyusun laporan hasil pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan rotasi tugas untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan meningkatkan objektivitas dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dapat sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Sistem informasi yang terintegrasi dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara real-time. Dengan demikian, pengawas dapat dengan mudah mengidentifikasi anomali atau penyimpangan yang terjadi. Selain itu, penggunaan teknologi analisis data seperti data mining dan machine learning dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat secara kasat mata.

c. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi

Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengawasan KIP Kuliah sangat penting. Itjen perlu menjalin kerjasama yang erat dengan perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta kementerian/lembaga terkait lainnya. Melalui koordinasi yang baik, dapat dilakukan pertukaran informasi, sinkronisasi data, dan penyusunan strategi pengawasan yang lebih efektif.

d. Evaluasi Berkala

Evaluasi secara berkala terhadap sistem pengawasan sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ada. Kegiatan Evaluasi dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya survey lapangan, wawancara dengan pihak terkait, atau melakukan analisis data. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengawasan.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 13. No. 01. Februari, 2025, Hal: 221-243

DAFTAR PUSTAKA

- Terry, G.R. “Dasar-Dasar Manajemen.” Alih Bahasa, G.A. Ticoalu – Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- “Anggaran Kartu Sakti Jokowi Sudah Ada Di APBN 2014 _ Politik...,” n.d.
- “Distribusi 14 Juta Keping KIP Ditargetkan Tuntas Mei 2016 _ Republika Online,” n.d.
- Kuswandari, Inna, Abulloh Jaelani, and Nenik Estuningsih. “Sinergi Kartu Indonesia Pintar Dan Bidikmisi Sebagai Motivasi Studi Lanjut Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas.” *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)* 7, no. 2 (July 6, 2022): 934–41. <https://doi.org/10.21067/jpm.v7i2.6833>.
- Mulyosaputro, Purnomo. *Langkah-Langkah Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi/Konsultansi)*. Edited by Zulfa. *Farha Pustaka*. Pertama. Vol. 1. Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.
- Prabowo, Dani. “Politisi Gerindra: ‘Kartu Sakti’ Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM.” *18 November, 2014*. <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/09221121/Politisi.Gerindra.Kartu.Sakti.Jokowi.Hanya.Redam.Sementara.Dampak.Kenaikan.Harga.BBM>.
- Rakhmanto, Ajib. “Pengertian Istilah Dan Sejarah Audit” 3 (2001): 1–45.
- Waluyo, Andylala. “Presiden Jokowi Luncurkan 3 Kartu Untuk Rakyat Miskin Indonesia.” *Voaindonesia.Com*, 2014. <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-luncurkan-3-kartu-untuk-rakyat-miskin/2505763.html>.
- Zainal, Rahmi, Kiki Joesyiana, Haznil Zainal, Sri Wahyuni, Annesa Adriyani Stie, and Persada Bunda. “Manajemen Pengelolaan Keuangan Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Pada Perguruan Tinggi Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Persada Bunda (STIE-STISIP-STBA-STIH),” n.d. <https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/JIPM>.
- Zakiah, Siti. “Apa Itu KIP Kuliah Merdeka?” *Telkom University*, 2024. [https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-kip-kuliah-merdeka/#:~:text=Program Kartu Indonesia Pintar \(KIP, keluarga kurang mampu di Indonesia](https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-kip-kuliah-merdeka/#:~:text=Program%20Kartu%20Indonesia%20Pintar%20(KIP,keluarga%20kurang%20mampu%20di%20Indonesia).